

Abstrak

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka menunjang likuiditas dan efisiensi dalam pengelolaan kas negara merupakan terobosan baru dalam mekanisme pembayaran belanja atas beban APBN dan menjadi salah satu Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Bengkulu dan mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan Bendahara Pengeluaran selaku informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPN Bengkulu telah mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah untuk pembayaran belanja barang operasional serta telah menerapkan batasan limit penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018. Kendala yang ada di dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah antara lain terbatasnya mesin EDC, pengenaan biaya administrasi, dan kelemahan pengendalian terkait pembayaran kewajiban PPh Pasal 23 oleh vendor. Atas beberapa permasalahan tersebut, KPPN Bengkulu harus melakukan beberapa upaya mitigasi berupa komunikasi kepada bank, klien, dan para stakeholder terkait lainnya.

Kata kunci: kartu kredit pemerintah, instrumen keuangan modern, uang kas yang menganggur, pengelolaan kas negara, implementasi kartu kredit pemerintah.

Abstract

The application of the Government Credit Card in order to support liquidity and efficiency in managing state treasury is a new breakthrough in the mechanism for payment of expenditures as the expense of the State Budget and is one of the Strategic Initiatives of the Bureaucratic Reform and Institutional Transformation Program of the Ministry of Finance. This study aims to determine the application of the Government Credit Card at KPPN Bengkulu and identify problems in the application of the Government Credit Card. This research is held under a qualitative descriptive approach through interview with the Expenditure Treasurer as the informant. The results of this study indicate that KPPN Bengkulu has implemented Government Credit Card for payment of operational goods expenditures and has implemented limit on the use of Government Credit Card as regulated in the Minister of Finance Regulation Number 196/PMK.05/2018. Problems in implementing Government Credit Card include limited EDC machines, imposition of administrative fees, and control weaknesses related to the payment of Article 23 Income Tax obligations by vendors. For some of these problems, KPPN Bengkulu have to carry out several mitigation efforts in the form of communication to banks, clients, and other relevant stakeholders.

Keywords: government credit card, modern financial instrument, idle cash, state treasury management, application of government credit card